

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik. Hal itu menjadikan partai politik sebagai organisasi yang berperan sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang akan meneruskan kepemimpinan selanjutnya ataupun jabatan tertentu baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum khususnya calon anggota legislatif, salah satu syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan kepemiluan harus di usung oleh partai politik tertentu. Selain itu, salah satu regulasi kepemiluan yang tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 173 dan pasal 245 menegaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila telah menerapkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat dan juga daftar bakal calon legislatif harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, baik di DPR

maupun di DPRD provinsi/kabupaten/kota.

*Affirmative action* semakin dipertegas dengan amanat undang-undang yang tertuang pada pasal 246 ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap tiga bakal calon legislatif, terdapat minimal 1 bakal calon legislatif perempuan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, dari 575 anggota DPR RI terpilih ada 118 perempuan yang terpilih atau berada pada 20,5 persen keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>1</sup> Hasil pemilu 2019 merupakan capaian tertinggi representasi perempuan di parlemen apabila dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya. Namun angka 20,5 masih belum mencapai angka ideal 30% perempuan di parlemen. Sehingga yang masih menjadi permasalahan saat ini masih sulitnya mencapai 30% angka keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia, Khofifah Indar Parawansa (2002 : 48) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di politik. Faktor pertama yaitu konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik hanya untuk laki-laki, dan bahwa tidak bagi pantas seorang perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Perempuan tidak memperoleh

---

<sup>1</sup> Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019

banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Faktor lainnya adalah kemiskinan, keluarga dan sistem multipartai.

Belum tercapainya angka ideal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja. Melainkan di tingkat daerah di Indonesia pun terjadi hal yang serupa. Seperti yang terjadi pada hasil pemilu legislatif 2019 di Kota Tasikmalaya yang masih belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya yang diikuti oleh beberapa partai peserta pemilu yang lolos secara verifikasi, administrasi, dan keikutsertaan kader salah satunya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PPP merupakan <sup>2</sup> partai yang telah ada di Indonesia sejak sebelum era reformasi. PPP salah satu partai besar yang memiliki sejarah besar pada Pemilu Indonesia beberapa puluh tahun ke belakang. PPP dideklarasikan pada 5 Januari 1973 yang merupakan hasil fusi dari 4 partai islam kala itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSI, dan Partai Islam Perti. Pada awalnya PPP berideologi Islam moderat. PPP sering disebut “Rumah besar

---

<sup>2</sup> Sejarah PPP diakses dari <https://ppp.or.id/sejarah-singkat-ppp/>

umat Islam”, karena PPP memfasilitasi berbagai unsur islam politik. Dan pada era reformasi, PPP kembali menggunakan azaz Islam dan lambang Ka’bah (Waluyo, 2015: 480).

Sepak terjang PPP dalam kancah perpolitikan di Indonesia memang mengalami naik turun namun sampai saat ini PPP masih menjaga keeksistensiannya. Pada tingkat lokal di Kota Tasikmalaya, eksistensi PPP sebagai partai Islam keberadaanya masih terus mendominasi di Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Santri. Hal tersebut terlihat dari jejak hasil pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya apabila dilihat dari 3 periode terakhir PPP selalu mendominasi komposisi DPRD Kota Tasikmalaya dengan mendapat perolehan suara terbanyak. Berikut data hasil perolehan kursi DPRD Kota Tasikmalaya dalam tiga periode Pemilu:

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2009 – Tahun 2019**

PARTAI	PEMILU 2009	PEMILU 2014	PEMILU 2019
GERINDRA	1 Kursi	4 Kursi	<b>10 Kursi</b>
PKS	4 Kursi	4 Kursi	4 Kursi
PAN	7 Kursi	5 Kursi	5 Kursi
PKB	1 Kursi	2 Kursi	3 Kursi
GOLKAR	4 Kursi	5 Kursi	5 Kursi
<b>PPP</b>	<b>8 Kursi</b>	<b>10 Kursi</b>	9 Kursi
PBB	3 Kursi	3 Kursi	1 Kursi
PDIP	5 Kursi	7 Kursi	5 Kursi
PBR	4 Kursi	-	-
DEMOKRAT	8 Kursi	4 Kursi	2 Kursi
NASDEM	-	1 Kursi	1 Kursi
<b>JUMLAH</b>	<b>45 Kursi</b>	<b>45 Kursi</b>	<b>45 Kursi</b>

**Sumber:** KPU Kota Tasikmalaya

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Tasikmalaya diikuti oleh sebanyak 38 Partai Politik. Namun hasil perolehan kursi DPRD Kota Tasikmalaya tahun 2009 hanya didapatkan oleh 10 partai. Berdasarkan tabel diatas, PPP meraih 8 kursi DPRD sama halnya dengan Partai Demokrat. Meskipun demikian, berdasarkan data dari KPU Kota Tasikmalaya, pada hasil perolehan suara Pemilu 2009 dari 4 dapil di Kota Tasikmalaya terhitung PPP memperoleh 56.269 suara. Dan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 44.758. Sehingga dalam hasil suara PPP masih unggul dari partai Demokrat. PPP dalam memperoleh kursi jabatan di DPRD Kota Tasikmalaya terus dilanggengkan sampai pada Pemilu 2014 PPP kembali berhasil mendominasi komposisi DPRD Kota Tasikmalaya.

Pada Pemilu legislatif tahun 2014 untuk DPRD Kota Tasikmalaya, PPP mendapatkan 10 kursi. Sehingga PPP mengalami kenaikan perolehan kursi DPRD Kota Tasikmalaya dari periode Pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2009 yang mendapatkan 8 kursi. Dominasi PPP di DPRD Kota Tasikmalaya terus meningkat merupakan target PPP untuk menempatkan kader-kader PPP di kursi-kursi Pemerintahan. Keikutseraan PPP pada Pemilu Legislatif diteruskan pada Pemilu Legislatif 2019

Pada pemilu 2019 PPP mendapatkan 9 kursi sehingga berada pada urutan kedua atas perolehan kursi terbanyak oleh Gerindra 10 kursi. Meskipun demikian, dari perolehan suara PPP lebih unggul dengan memperoleh 87.636 suara, Sedangkan Partai Gerindra memperoleh 80.871 suara. Namun, hasil pembagian dengan metode pembagian murni per daerah

pemilihan dari 45 kursi sehingga PPP mendapatkan 9 kursi dan Gerindra 10 kursi. Sehingga berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tiga periode terakhir Pemilu Legislatif, PPP terus menunjukkan eksistensinya dengan perolehan suara yang selalu mendominasi, sehingga kerap kali jajaran anggota maupun pimpinan di DPRD Kota Tasikmalaya berasal dari PPP.

Tiap partai politik berlomba-lomba memperoleh suara untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan mengusung calon-calon terbaik dari Partainya. Setiap partai peserta pemilu mengusung calon legislatif laki-laki dan juga calon legislatif perempuan. Terkhusus perempuan, terdapat regulasi khusus yang menghendaki adanya syarat calon perempuan sekurang-kurangnya 30%. PPP selaku partai peserta Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya yang telah lolos secara verifikasi, administrasi, tentu juga sudah memenuhi syarat terdapatnya calon perempuan 30%. Berikut daftar calon legislatif perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu legislatif 2019 di Kota Tasikmalaya:

**Tabel 1. 2 Daftar Calon Legislatif Perempuan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 2019 Kota Tasikmalaya**

No.	Nama Calon	Daerah Pemilihan
1.	Hj. Ai Rika Susilawati, A.Md	Kota Tasikmalaya 1 Kec. Cihideung – Kec. Tawang – Kec. Bungursari
2.	Ir. Ira Andriani, M.M	
3.	Deti Purnamasari	
4.	Yani Rohayani S.Pd	
5.	Hj. Yoke Yuliantie, SH	Kota Tasikmalaya 2 Kec. Cipedes – Kec. Indihiang
6.	Tita Widiawati	
7.	Hj. Ina Rehasti	
8.	Dra. Hj. Uun Munawaroh	Kota Tasikmalaya 3 Kec. Cibereum – Kec. Purbaratu
9.	Hj. Ai Ellah Rohilah	

10.	Dede Yeyet Rohayati	– Kec. Tamansari
11.	Hera Nurlinawati, S.Sos	
12.	Novi Alfiani, S.E	Kota Tasikmalaya 4 Kec. Kawalu – Kec. Mangkubumi
13.	Ani Mulyani, S.E	
14.	Anggi Lestari, S.Pd	
15.	Hj. Nurjanah	
16.	Dede Syaripatul Khoeriah, S.Pd.I	

**Sumber:** KPU Kota Tasikmalaya 2019

Sebagai peserta pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya 2019 PPP telah memenuhi syarat untuk mengikutsertakan calon perempuan minimal 30%. Sama halnya dengan partai politik lainnya yang telah memenuhi syarat tersebut. Namun pada level hasil pemilu, caleg perempuan masih sulit untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Hal tersebut terlihat dari hasil pemilu legislatif pada tiga periode terakhir yang menunjukkan dari 45 kursi di DPRD Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh kaum laki-laki karena masih jauh dari angka ideal 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Berikut data jumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2009 – periode 2019:

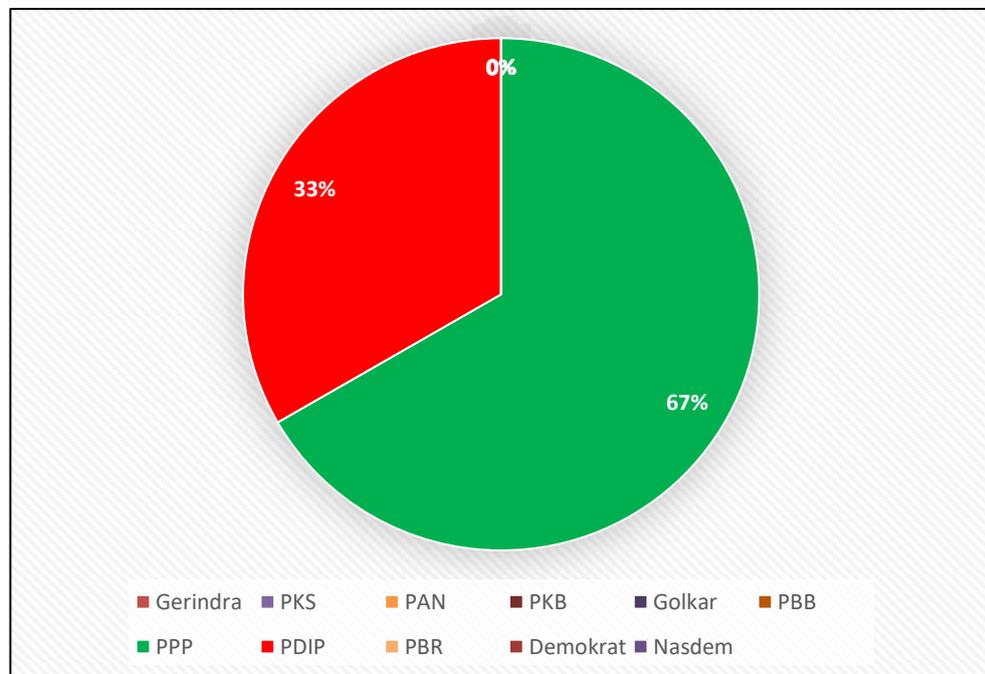
**Tabel 1. 3 Jumlah Persentase Anggota DPRD Perempuan Kota Tasikmalaya**

PARTAI POLITIK	PEMILU 2009		PEMILU 2014		PEMILU 2019	
	L	P	L	P	L	P
GERINDRA	1	-	4	-	10	-
PKS	4	-	4	-	4	-
PAN	7	-	5	-	5	-
PKB	1	-	2	-	3	-
GOLKAR	3	1	5	-	5	-
PPP	7	1	8	2	7	2

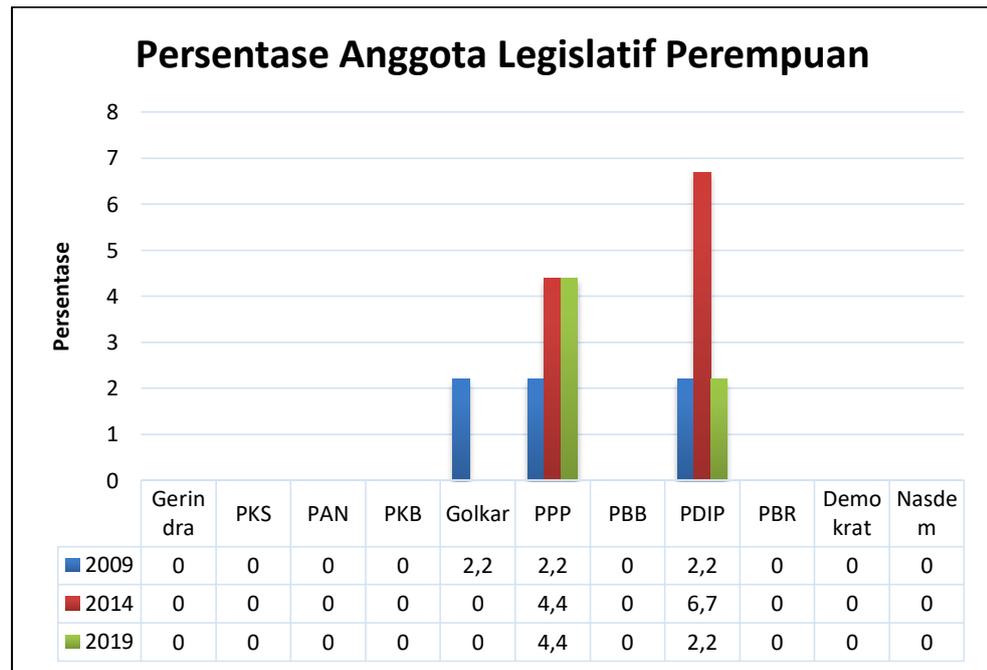
PBB	3	-	3	-	1	-
PDIP	4	1	4	3	4	1
PBR	4	-	-	-	-	-
DEMOKRAT	8	-	4	-	2	-
NASDEM	-	-	1	-	1	-
PRESENTASE	6,6 %		11,1 %		6,6 %	

Sumber: KPU Kota Tasikmalaya

**Gambar 1. 1 Diagram Persentase Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2019**



**Gambar 1. 2 Diagram Persentase Anggota Legislatif Perempuan**



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa *Affirmative Action* berupa regulasi mengenai batas minimal perempuan di parlemen masih belum tercapai. Terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi di lembaga DPRD Kota Tasikmalaya. Menurut Subiakto (2015: 182) semakin rendahnya proporsi keberadaan perempuan yang berpartisipasi aktif di institusi politik juga akan mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili, kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi kaum perempuan karna tidak hanya berdampak bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan dalam perpolitikan Negara. Namun, keterbatasan partisipasi ini mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap upaya pemberdayaan perempuan, yaitu pada tidak optimalnya artikulasi politik dan kepentingan perempuan.

Upaya untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pemerintah yang membuat regulasi terkait keterwakilan perempuan dalam politik. Namun ada faktor lain untuk mendorong upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, salah satunya yaitu Partai politik. Karena yang berperan penting dalam keberhasilan sistem politik tersebut selain dari perempuan itu sendiri, partai politik lah yang berperan penting sebagai lembaga yang mewadahi dan berfungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik. Diperlukan adanya keseriusan partai dalam menjalankan sistem politik tersebut. Salah satunya dalam proses rekrutmen politik terhadap para calon. Karena kualitas rekrutmen politik yang dilakukan tentu akan berpengaruh terhadap hasil calon legislatif untuk mendapatkan kursi jabatan.

Berdasarkan data yang telah disajikan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama 3 periode terakhir pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya selain selalu mendominasi perolehan suara dan kursi DPRD, PPP kerap kali berhasil menempatkan calon legislatif perempuan dari partainya untuk mendapatkan kursi DPRD Kota Tasikmalaya. Dibandingkan dengan partai lain yang belum berhasil meloloskan caleg perempuan yang diusung oleh partainya untuk memperoleh kursi DPRD. Dalam hal ini, tentu PPP memiliki strategi untuk meloloskan caleg perempuan dari partainya. Salah satunya didasari dari proses awal yaitu

pada Rekrutmen Politik terhadap caleg perempuan.

Dengan demikian, mencermati dan memperhatikan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenuhan kebijakan *Affirmative Action* dalam upaya meningkatkan representasi perempuan dalam pencalonan perempuan hingga representasi perempuan di parlemen pada pemilu legislatif 2019 Kota Tasikmalaya. Dengan judul penelitian **”Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Calon Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan *Affirmative Action* Pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Calon Legislatif Perempuan dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan *Affirmative Action* pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap calon legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Tasikmalaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pandangan untuk akademisi Ilmu Politik, khususnya dalam mengetahui pola rekrutmen partai politik terhadap calon legislatif perempuan.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pola rekrutmen yang baik terhadap calon legislatif perempuan dalam pemenuhan kebijakan *affirmative action*.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kajian bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai pola rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kepada setiap pembaca dan kemampuan akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pola rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada pembahasan bagaimana pola rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan terhadap calon legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan *Affirmative Action* maka dalam sub bab ini akan disajikan penelitian terdahulu yang memiliki konsep maupun teori yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti, maka penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian; Nama Peneliti</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Partai Politik pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Golkar Surabaya).  Nama peneliti: Tania Aryadna Prasetya	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.	Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik.	Penelitian ini menggunakan Objek yang berbeda yaitu Partai Golkar, dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kota Surabaya.
Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi DPD PDIP Jawa Tengah)  Nama Peneliti: Irsyad Majid	Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif	Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan teori yang digunakan.	Penelitian ini menggunakan Objek yang berbeda yaitu DPD PDIP , dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Jawa Tengah.

Politik dan Perempuan (Penerapan <i>Affirmative Action</i> dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 2019).  Nama Peneliti: Helena Yolanda	Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Persamaan penelitian ini yaitu terkait fokus penelitian mengenai pola rekrutmen dan penerapan <i>Affirmative Action</i> di partai.	Penelitian ini menggunakan Objek yang berbeda yaitu DPP PSI dengan lokasi penelitian di Jakarta Pusat.
--	--	--	--

**Sumber:** Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan dapat dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu *“Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Calon Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan Affirmative Action pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya”*. Tiga penelitian yang peneliti jabarkan sebelumnya memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang akan diteliti dalam tulisan ini yaitu mengenai rekrutmen politik terhadap caleg perempuan.

Namun, meskipun adanya persamaan variabel tersebut, tentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan pada tulisan ini. Yang pertama, pada penelitian Tania Aryadna Prasetya (2019) yang berjudul *“Pola Rekrutmen Calon Legislatif*

*Perempuan Dalam Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Golkar Surabaya)*” Penelitian ini memfokuskan permasalahan untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen partai Golkar terhadap caleg perempuan, karena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu karena tidak adanya caleg dari partai Golkar Surabaya yang lolos pada Pemilu 2019 di Kota Surabaya.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa proses rekrutmen caleg perempuan dalam partai Golkar dilakukan melalui dua pola rekrutmen yaitu pertama, Partai Golkar merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya. Kedua, partai Golkar melakukan proses penjangkaran yang dilakukan oleh suatu tim seleksi dari DPP Partai Golkar Kota Surabaya untuk menyeleksi bakal calon legislatif muda yang akan ditetapkan dalam daftar Caleg DPP Kota Surabaya dari partai Golkar. Penelitian ini hanya berfokus pada pola rekrutmen caleg perempuan saja. Dalam tulisannya tidak ditemukan bahasan mengenai upaya pemenuhan *Affirmative Action* oleh partai Golkar Surabaya.

Kemudian penelitian kedua, dilakukan oleh Majid (2020) dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi DPD PDIP Jawa Tengah). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah pada pemilu 2019 dilakukan secara terbuka baik untuk kader partai atau non kader. Pada tahap sertifikasi, prosesnya tersentralisasi dengan memberi peran besar kepada DPP, dan juga ada pemberian

penghargaan atau reward bagi kader yang dinilai telah berjasa kepada partai, dan rekrutmen dilaksanakan secara netral gender karena tidak adanya perbedaan perlakuan bagi perempuan ataupun laki-laki. Pada penelitian ini, terdapat kesamaan yaitu Partai yang menjadi objek penelitian merupakan partai yang meloloskan caleg perempuan dengan kuantitas terbanyak. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pola rekrutmen caleg perempuan saja, dan tidak membahas secara rinci mengenai upaya pemenuhan *Affirmative Action* oleh partai tersebut.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2019) dengan judul Politik dan Perempuan (Penerapan *Affirmative Action* dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 2019). Penelitian ini membahas mengenai proses rekrutmen dan penerapan *affirmative action* di PSI bagaimana upaya PSI untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen caleg terdapat dua gelombang. Tiap gelombang terdiri tiga tahapan mulai dari pendaftaran, wawancara, dan sosialisasi kepada masyarakat. Serta upaya PSI dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dilakukan dengan PSI mencari caleg ke komunitas perempuan, dan mengarahkan kader partai untuk maju menjadi caleg.

Dari ketiga penelitian terdahulu ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki fokus penelitian yang sama mengenai pola

rekrutmen partai politik terhadap caleg perempuan, namun belum ditemukan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek dan lokasi penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dan juga dari ketiga penelitian yang dipilih oleh penulis tidak ada yang membahas secara mendalam mengenai pemenuhan *Affirmative Action* oleh partai, ketiganya hanya berfokus untuk mengetahui pola rekrutmen politik saja. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya. Pada penelitian ini, peneliti akan membawa pembahasan mengenai pola rekrutmen yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap caleg perempuan pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya dan menitikberatkan kepada upaya pemenuhan *Affirmative Action* oleh PPP Kota Tasikmalaya melalui pola rekrutmen yang dilakukan.